

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan ekonomi merupakan salah satu topik hangat yang menjadi sorotan pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan proses menciptakan tambahan input untuk mendorong roda perekonomian negara sehingga terjadi peningkatan output secara terus menerus. *Output* yang dihasilkan oleh suatu negara dapat mengukur tingkat kemakmuran dan keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, sehingga upaya pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan output secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, peningkatan tersebut kemudian akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan naiknya pendapatan per kapita. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditentukan pula oleh produktivitas masyarakatnya, hal ini dikarenakan tinggi rendahnya produktivitas masyarakat akan berbanding lurus dengan total output yang dihasilkan suatu negara. Namun sayangnya realitas yang terjadi di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak produktif karena adanya hambatan dalam kesempatan kerja. Jumlah pencari kerja yang lebih besar dibandingkan daya tampung dari lapangan pekerjaan kemudian menimbulkan gap yang menjadi akar dari pengangguran (Sembiring & Sasongko, 2019).

Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Jumua'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”, Q.S. 62 (10).

Ayat diatas, merupakan perintah Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal serta menghindari perilaku buruk lainnya dalam mencari nafkah. Bekerja secara halal akan membuat hidup lebih tentram dan damai, maka dari itu umat muslim harus menyertakan Allah saat mencari rezeki.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah diizinkan bekerja tetapi belum memulai pekerjaannya (Lestari & Woyanti, 2020). Seseorang dikatakan tidak menganggur apabila sudah bekerja dalam satu minggu dan mendapatkan upah dari pekerjaannya, tetapi tidak bekerja karena tidak ada pekerjaan, sedangkan seseorang tidak bekerja karena tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu panggilan pekerjaan, yaitu orang yang dianggap sedang menganggur. Seseorang yang Dengan kata lain, pengangguran ialah individu yang tidak memiliki peran dalam proses produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (Mankiw, 2018).

Angkatan kerja yang dapat tumbuh dengan cepat, dapat menjadi potensi bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan. Dengan adanya perluasan lapangan pekerjaan tersebut, apabila lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian

angkatan kerja baru tersebut akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh David et al. (2019), menjelaskan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, dimana semakin tinggi jumlah angkatan kerja, maka dapat mempengaruhi peningkatan pada rasio pengangguran.

Terjadinya pengangguran karena tingginya tingkat Angkatan kerja yang disebabkan rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan (Putro & Setiawan, 2013). Pembangunan suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi menciptakan kesempatan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja yang tepat. Salah satu masalah ekonomi Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang terus melanda kesengsaraan ekonomi Indonesia. Pengangguran dapat meningkat karena meningkatnya angkatan kerja dan ketidakseimbangan kesempatan dalam bekerja (Piang *et al.*, 2023).

Masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dipandang sebagai faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, semakin besar angkatan kerja, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi pasar dalam negeri. Tetapi kebenarannya terletak pada kemampuan sistem ekonomi untuk menyerap tenaga kerja tambahan dan menggunakannya secara produktif. Berikut adalah data angka pengangguran 2021 untuk delapan provinsi di Indonesia

Tabel 1. 1
Provinsi di Indonesia dengan Tingkat Pengangguran Terbanyak pada tahun 2021

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran (%)
1	Kepulauan Riau	9,91%
2	Jawa Barat	9,82%
3	Banten	8,98%
4	DKI Jakarta	8,5%
5	Sulawesi Utara	7,06%
6	Maluku	6,93%
7	Kalimantan Timur	6,83%
8	Sumatera Barat	6,52%

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021. Kepulauan Riau menduduki peringkat pertama se Indonesia yaitu dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 9,91% pada tahun 2021. Meskipun angka tergolong cukup tinggi, TPT Riau 2021 sebenarnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan TPT tahun 2020 yang mencapai 10,34 persen. Peringkat kedua diduduki oleh provinsi Jawa Barat dengan jumlah pengangguran sebesar 9,82%. Peringkat ketiga diduduki oleh provinsi Banten sebagai angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran provinsi Banten sebesar 8,98%. Selanjutnya, peringkat keempat diduduki oleh provinsi DKI Jakarta yaitu dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 8,5% pada tahun 2021. Peringkat 5 diduduki oleh provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah pengangguran yaitu sebesar 7,06%. Sedangkan untuk peringkat keenam diduduki oleh Maluku dengan jumlah pengangguran sebesar 6,93%. peringkat

ketujuh diduduki oleh provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 6,83% pada tahun 2021. Peringkat ke delapan diduduki oleh provinsi Sumatera Barat yaitu dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 6,52% pada tahun 2021 (Nurhadi, 2021).

Data yang ditunjukkan pada tabel di atas menerangkan bahwa kondisi pengangguran provinsi Jawa Barat walaupun pada tahun sebelumnya mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua se-Indonesia, hal ini berarti bahwa provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dapat mengatasi kondisi pengangguran terbuka yang dihadapi. Sehingga perlu diketahui penyebab-penyebab utama yang menjadikan provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran yang cenderung tinggi dibanding provinsi lainnya.

Selain itu, data diatas dapat diperkuat dengan *trend* data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2017-2022 untuk provinsi Jawa Barat, berikut adalah pemaparannya.

Tabel 1. 2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
1	2017	8,22%	63,34%
2	2018	8,23%	62,84%
3	2019	8,04%	64,99%
4	2020	10,46%	64,53%
5	2021	9,82%	64,95%
6	2022	8,31%	66,15%

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data diatas prosentase TPT dari tahun 2017-2022 mengalami naik turun, begutu pula dengan TPAK yang mengalami *trend* fluktuatif. Sehingga semakin memperkuat tentang anggapan bahwa provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dan tingkat partisipasi angkatan kerja terbanyak.

Berdasarkan berbagai macam literatur baik secara teoritikal maupun empirikal, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah, diantaranya bisa berupa faktor ekonomi makro di setiap daerah misalnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan standar pengupahan di daerah yang bersangkutan (Upah Minimum). Salah satu faktor ekonomi makro di daerah yang berpotensi mempengaruhi tingkat pengangguran ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode (Sukmaraga, 2011). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dan dengan meningkatnya nilai PDRB, demikian pula total nilai tambah barang dan jasa di semua unit ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat. Peningkatan jumlah barang dan jasa menyebabkan peningkatan jumlah pekerja yang diminta (Silaban *et al.*, 2020). Berdasarkan hukum Okun, kita dapat melihat bahwa terdapat hubungan negatif yang

signifikan antara produk domestik bruto regional dan pengangguran di suatu wilayah (Kuncoro, 2015).

Faktor penyebab tingkat pengangguran tinggi adalah kondisi di mana jumlah angkatan kerja lebih besar dari jumlah penduduk yang bekerja. Pengangguran dapat meningkat jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang cukup bagi angkatan kerja yang terus bertambah. (Sisputro, 2013). Jumlah penduduk Jawa Barat terus bertambah dari tahun 2018 hingga 2020. Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, demikian pula dengan jumlah tenaga kerja. Bertambahnya angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja menyebabkan bertambahnya pengangguran. (Hartanto, 2017).

Menurut Anggraini (2018), peningkatan jumlah penduduk secara otomatis mengakibatkan naiknya jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu jumlah peningkatan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia, maka dapat menyebabkan pengangguran yang semakin meluas.

Tingginya jumlah angkatan kerja yang menganggur jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Untuk menyeimbangkan permasalahan yang terjadi, diperlukan adanya peningkatan penyerapan angkatan kerja. Peningkatan penyerapan angkatan kerja bisa dilakukan lewat pembangunan di sektor industri. Penyerapan tenaga kerja adalah istilah yang mengacu pada kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Perusahaan

menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kriteria tersebut bisa berupa keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan (Shaffa, 2023).

Faktor ketiga yang juga mempengaruhi jumlah pengangguran adalah pendidikan. Semakin berpendidikan seseorang, semakin tinggi kesempatan dan kesempatan kerja. Pekerja berkualifikasi tinggi cenderung memiliki berbagai keterampilan dan keahlian yang meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran (Suhadi & Setyowati, 2022). Menurut Elfindri (2001: 239) adapun hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan dapat menentukan status pekerjaan seseorang, karena dengan tingkat pendidikan yang lebih baik maka seseorang akan cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan disisi lain juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, bila seseorang itu berpendidikan tinggi, maka keadaan pengangguran tidak akan separah bila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah dan mereka juga mampu memperoleh upah yang berkisar pada batas upah minimum (Prawira, 2018).

Faktor lain yang berpotensi menyebabkan naik atau turunnya tingkat pengangguran di suatu daerah ialah upah minimum. Kebijakan pemerintah terkait standar upah minimum di setiap daerah juga kerap kali mempengaruhi tingkat pengangguran. Secara teoritis dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka semakin besar dampaknya terhadap kenaikan biaya produksi. Akibatnya, perusahaan terpaksa memangkas staf

untuk meningkatkan efisiensi, yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran (Sari, 2016).

Kondisi ini sesuai dengan pernyataan (Todaro, 2006) dan (Sumarsono, 2003), semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi, jika ada penawaran, baik permintaan tenaga kerja baru maupun penggunaan tenaga kerja yang ada akan berkurang sehingga meningkatkan angka pengangguran (Ehrenberg dan Smith, 1998). membuat poin serupa di (Haris, 2013), dengan alasan bahwa tingkat upah rata-rata yang lebih tinggi mengurangi permintaan tenaga kerja, sehingga menciptakan pengangguran.

Fakta berbeda tentang hubungan upah terhadap pengangguran terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhan et al, 2018) yang menunjukkan pengaruh upah minimum kota secara langsung terhadap tingkat pengangguran signifikan dengan nilai -1,269. Hal ini berarti peningkatan upah minimum berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari dan Woyanti (2020) yang menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Hasil ini berbeda dengan Teori Okun's Law, yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan PDRB menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah pengangguran yang disebabkan karena laju PDRB di daerah penelitian tersebut berorientasi pada padat modal bukan padat karya yaitu penggunaan modal yang lebih besar dan penggunaan teknologi yang lebih modern daripada menggunakan sumber daya manusia atau *labor intensive* (Tengkoe &

Soekarno, 2014). Variabel upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Variabel angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Penelitian oleh Neumark *et al* (2006) menunjukkan bahwa di Brazil peningkatan upah minimum menurunkan daya serap pekerjaan untuk kepala keluarga, namun meningkatkan daya serap pekerjaan bagi anggota keluarga lainnya (Biçerli & Kocaman, 2019).

Kajian Prawira (2018) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap publikasi angka pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi sebagian memiliki dampak negatif, tetapi tidak berdampak besar pada tingkat pengangguran. Variabel upah minimum negara sebagian positif dan terkait dengan pengangguran. Fluktuasi tingkat pendidikan juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius terhadap pertumbuhan ekonomi, sistem upah minimum, peningkatan kualitas pendidikan, isu ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran dan secara bersama-sama variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota

(UMK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten (Mahroji, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, Pendidikan, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah UMK berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah PDRB, angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, angkatan kerja, tingkat pendidikan dan UMK secara bersamaan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB dan UMK terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait penanganan masalah pengangguran

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran bagi penelitian dimasa mendatang, yang dapat menambah wawasan pembaca mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

- a. Dapat menjadi bahan referensi baik dalam kegiatan perkuliahan, diskusi maupun penelitian-penelitian lanjutan yang terkait dengan topik pengangguran.
- b. Sebagai salah satu rujukan untuk penelitian dimasa mendatang.